

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, terdiri dari 17.504 pulau dengan luas laut tiga kali dari luas daratannya. Panjang garis pantai Indonesia yaitu 81.000 km lebih dan luas lautnya 2,7 juta km<sup>2</sup> atau sama dengan 70% dari luas negara Indonesia itu sendiri (Dahuri, 2000). Sehingga berdasarkan *resources based economy*, Indonesia memiliki banyak kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam cara dan kebijakan yang tepat.

Saat ini, Indonesia memiliki 38 Provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan sumber daya manusia yang cukup secara kuantifikasi dengan 270 juta jiwa, sehingga secara otomatis kebijakan-kebijakan desentralisasi harus dilakukan serta di dorong lebih efektif di tengah banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh pemberlakuan otonomi daerah dengan maraknya kasus penyelewengan jabatan dan kekuasaan (*abuse of power*) dari para pemangku jabatan mulai dari nasional sampai daerah.

Fenomena politik dalam pemerintahan terutama pemerintahan desa juga tidak bisa luput dari perhatian, apalagi dengan disahkannya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, seperti memberi signal bahwa pembangunan akan semakin masif ke wilayah pedesaan, sehingga memberi potensi munculnya raja-raja kecil di daerah dengan masa perpanjangan jabatan, sehingga juga berpotensi melahirkan *local bossism* sebagai bagian penting dari politik elektoral dan pembangunan di tingkat daerah, khususnya di tingkat desa.

Padahal apabila membahas mengenai permasalahan bosisme lokal atau bos lokal ini sering dijumpai pada masalah-masalah yang sering dianggap kecil dan sepele padahal memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat, yang dimana local bossism ini merupakan kajian politik amat sangat rumit dan bervariasi adanya, seperti pada permasalahan distribusi kongkalikong, perselingkuhan dan korupsi di tingkat desa, sebab data menunjukkan bahkan data *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 676 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terjerat korupsi, bahkan data KPK menunjukkan lebih besar angkanya yaitu 686 sejak dari 2015 hingga 2020.

Oleh sebab itu, pengawalan terhadap potensi desa benar-benar harus dilakukan pengawasan secara ketat dari berbagai pihak, sebab kemunculan ‘bos lokal’, ‘orang kuat lokal’ dan ‘predatoris lokal’ di Indonesia menjadi fenomena yang mewabah di era reformasi dan tidak bisa disepelekan. Sosok bos lokal berkembang seiring dengan penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah (desentralisasi), dimana fenomena ini jarang ditemukan di era sentralisasi karena pemerintahan dikelola secara terpusat. Desentralisasi digunakan oleh sebagian elit politik lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi, sehingga memunculkan orang-orang kuat di tingkat lokal (Sidel, 1999).

Para bos lokal melakukan berbagai strategi untuk bisa bertahan hidup—memperluas dan mempertahankan kekuasaan—dengan membentuk aliansi segitiga akomodasi, bersama aparat birokrasi negara dan politisi di tingkat lokal. Selain menggunakan partai politik, “orang kuat lokal” di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama, sebagaimana tampak pada Pemilukada Kabupaten Sumba Timur<sup>8</sup> dan kemenangan Ahmad Dahlan dalam pemilihan Walikota Batam. Sosok orang kuat lokal ditemukan pula pada

keluarga Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, Murman Efendi di Seluma Bengkulu, Zulkifli Nurdin di Jambi dan TB Chasan dan Keluarga Ratu Atut di Banten (Migdal, 2004).

Para Bos Lokal menguasai distrik (kabupaten/kota), ada bos yang menguasai provinsi dan ada bos yang menguasai pusat. Jejaring patron-klien para “bosisme lokal” tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron di tingkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi partai politik nasional. Para “bosisme lokal” melakukan pertukaran (transaksional) suara pemilih dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan umum, mereka mengubah bantuan-bantuan yang mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik.

Berbagai strategi dilakukan “bosisme lokal” untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya: (1) Menempatkan kerabat dan kroni sebagai walikota, wakil walikota dan anggota legislatif daerah; (2) Membentuk mesin politik sebagai broker suara; (3) Mengatur penempatan pejabat daerah; (4) Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi; (5) Mengatur peraturan daerah; (6) Mengatur keringanan pajak; (7) Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah; (8) Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan; (9) Intimidasi dan kekerasan politik; (10) Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Para bos lokal selain melakukan pengumpulan uang terhadap sumber daya negara juga melakukan aktivitas ekonomi ilegal seperti judi, penyelundupan, penebangan liar dan lain-lain.

Fenomena *local bossism* memiliki upaya mempertahankan relasi sisa feodalisme di zaman kapitalisme dan demokrasi muncul akibat dari kebutuhan ekonomi yang konkrit dan langsung dibutuhkan, ketimpangan sosial yang sangat tinggi dan kelangkaan akses terhadap barang kebutuhan pokok. Seakan ini menjadi penyebab yang lain adalah kegagalan kekerabatan masyarakat bekerja dan meningkatnya individualisme masyarakat, kegagalan aparat desa, aparat kota, aparat provinsi dan aparat pemerintah lainnya untuk menjamin kebutuhan subsistem (bertahan hidup) rakyat. Jadi ini bukan persoalan budaya politik tetapi lebih tepatnya sangat struktural.

Secara khusus John Sidel (1999) memberikan catatan kritis mengenai teori “orang kuat lokal” Joel Migdal.

1. Sifat dasar negara dan sifat dasar masyarakat yang menyebabkan “orang kuat lokal” tumbuh dan berkembang.
2. Kebangkitan “orang kuat lokal” dari dalam negara dan dari dalam masyarakat.
3. Struktur negara yang menciptakan kondisi bagi bangkit, bertahan dan berhasilnya “orang kuat lokal”.
4. Budaya politik dan tuntutan penduduk lokal yang partikular menyebabkan munculnya “orang kuat lokal” dan
5. Persediaan (*supply*) dari “orang kuat lokal” tidak selalu mencerminkan permintaan (*demand*) dari masyarakat.
6. “Orang kuat lokal” tidak menghambat perkembangan kapitalisme dan justru memfasilitasi dan mengambil manfaat pertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan mereka.

John Sidel memperingatkan bahwa “orang-orang kuat lokal” (*local*

*strongmen*) yang justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme. Di Indonesia “orang kuat lokal” dihambat kemunculannya selama Orde Baru dan di hambat juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun, apabila dilakukan perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung maka “orang kuat lokal” dapat muncul dan berkembang di Indonesia.<sup>23</sup> Reformasi melahirkan cabang-cabang kekuasaan baru di tingkat pusat maupun daerah, seperti partai politik baru dan penyelenggara pemerintah daerah (desentralisasi). Lahirnya partai politik secara otomatis melahirkan ketua partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian halnya dengan desentralisasi yang memberikan kewenangan yang luas kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengatur daerahnya sendiri. Desentralisasi mendorong lahirnya pemimpin daerah melalui rekrutmen politik secara inklusif.

Namun demikian, pemberian desentralisasi tidak otomatis melahirkan demokratisasi, justru sebaliknya memunculkan praktek korupsi, korupsi, kekerasan politik, yang dahulu menjadi kebiasaan rezim Orde Baru. Nordholt, Klinken, dan Hogeboom mengutarakan hal ini, bahwa desentralisasi tidak otomatis membuahkan demokratisasi, good governance, dan penguatan masyarakat sipil di tingkat daerah. Sebaliknya, seringkali kita menyaksikan desentralisasi korupsi, kolusi dan tindak kekerasan politis yang di masa lampau menjadi bagian dari rezim sentral Orde Baru, dan yang sekarang dibangun dilembagakan ke dalam pola-pola patrimonial yang sudah ada di tingkat daerah.

Hal tersebut juga dialami oleh Desa Diwek dengan keberadaan PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek,



Kabupaten Jombang memiliki permasalahan yang panjang terutama terjadinya hambatan pembangunan karena indikasi adanya penyelewengan otoritas dari oknum bos lokal dengan inisial 'K' yang merupakan mantan Kepala Desa Diwek yang memiliki pengaruh besar, pengikut yang militant, relasi kekuasaan ke tingkat daerah serta relasi kepentingan dengan pihak SGS yang panjang. Sebab meskipun saat ini HK tidak menjabat memiliki pengaruh yang kuat sekali sehingga pengelolaan dana CSR dari PT. SGS yang seharusnya mengikutsertakan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan (*decision maker*) kurang begitu diperhatikan, sehingga memiliki dampak sosial, ekonomi dan terutama lingkungan yang mengalami pencemaran.

Akan tetapi, warga masyarakat desa Diwek sering melakukan protes terhadap pemerintah desanya karena merasa keberadaan SGS tersebut kurang memiliki manfaat langsung terhadap masyarakat sekitar yang terdampak langsung, sehingga sering terjadi gesekan antara pihak desa, perusahaan dan masyarakat karena masih kuatnya pengaruh mantan kepala desa HK dalam mengendalikan penggunaan dana CSR di desa Diwek, sehingga dari gambaran umum tersebut, peneliti merasa tertarik dengan fenomena bos lokal/orang kuat lokal tadi yang justru bukan dipegang oleh kepala desa melainkan mantan kepala desanya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap pemaparan yang melatarbelakangi penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal dalam

mengendalikan penggunaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana bentuk penguasaan *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal terhadap pengelolaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari penguasaan *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal terhadap pengelolaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Ingin memahami peran *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal dalam mengendalikan penggunaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
- 1.3.2 Ingin memahami bentuk penguasaan *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal terhadap pengelolaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
- 1.3.3 Ingin memahami dampak yang ditimbulkan dari penguasaan *local bossism* yang dilakukan oknum elit lokal terhadap pengelolaan dana CSR dari PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS) Unit Jombang di Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritik dan konseptual peran *local bossism* dalam pengelolaan dana CSR .
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menemukan konsep baru tentang bentuk operasi dalam *setting* pengelolaan dana CSR.
- c. Penelitian ini diharapkan pengembangan dalam disiplin ilmu pengetahuan yang kolaboratif interrelatif, karena menghubungkan fungsi ekonomi, kebijakan daerah, politik desa dengan kepentingan individu.
- d. Penelitian ini juga diharapkan mampu menemukan 1 (satu) analisis yang mendalam tentang kekuatan aktor dalam mengendalikan kebijakan daerah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dasar pada publik tentang sebuah pengalaman ilmiah tentang kemampuan seorang aktor mantan orang kuat lokal yang sudah menjadi bos lokal dalam melakukan intervensi penggunaan dana CSR.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu membuka berbagai data mengenai kuatnya pengaruh bos lokal dalam melakukan intervensi urgensi, sehingga memiliki dampak yang sangat dinamis, terutama dampak negatif terhadap suistanabilitas pembangunan desa pada penelitian ini.



- c. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran masalah dan solusi yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat, terutama pemerintah daerah untuk menyelesaikan dampak lanjutan dari adanya bos lokal yang tidak efektif dalam keberlanjutan pembangunan desa dan sering terjadi konflik antar pemerintah desa, warga desa, pihak perusahaan dan pihak bos lokal.

